

PERILAKU POLITIK DAN INTENSI MEMILIH PADA MAHASISWA: STUDI PSIKOLOGI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2024

Muhammad Zulfa Alfaruqy¹

¹Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro,
Jalan Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

zulfa.alfaruqy@gmail.com

Abstrak

Mahasiswa merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks pemilihan umum kepala daerah. Salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum adalah Jawa Tengah, provinsi dengan populasi besar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perilaku politik dan intensi untuk menggunakan hak pilih pada mahasiswa dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan 500 mahasiswa ($M_{usia} = 19.01$) yang berasal dari tiga belas Daerah Pemilihan (Dapil). Data dikumpulkan melalui survei kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh informasi seputar Pilgub Jawa Tengah dari dua sumber utama, yaitu orang terdekat (orang tua dan teman) serta media sosial. Perilaku politik mahasiswa bersentuhan erat dengan kedua sumber tersebut, antara lain menyimak berita dan kampanye di media sosial serta mendiskusikan pasangan calon (paslon) dan isu-isu seputar Pilgub dengan orang terdekat. Sebanyak 87,60% mahasiswa menunjukkan intensi untuk menggunakan hak pilih pada 27 November 2024. Hal yang mendorong intensi tinggi dalam menggunakan hak pilih adalah dorongan menggunakan hak sekaligus memenuhi kewajiban sebagai warga negara; sikap positif terhadap kepala daerah yang kompeten dan kemakmuran Jawa Tengah; serta keyakinan untuk dapat berkontribusi. Di sisi lain, sejumlah mahasiswa menunjukkan intensi untuk tidak menggunakan hak pilih dengan alasan lokasi tempat pemilihan yang jauh, informasi tentang paslon yang minim, serta ketidakcocokan dengan paslon yang berkompetisi. Dalam konteks negara *flawed democracy* dengan budaya kolektif seperti Indonesia, penelitian ini menegaskan peran sentral lingkungan sosial, baik secara luring maupun daring, dalam meningkatkan intensi keterlibatan politik mahasiswa.

Kata kunci: keterlibatan politik; mahasiswa; perilaku; Pilgub Jawa Tengah; psikologi politik

Abstract

As a trace element in national society, college students are necessary in the context of regional head elections. Central Java, a province with a large population in Indonesia, ruled as one of the regions holding general elections. This study aims to explore the political behavior and the intention to vote of college students in the Central Java Gubernatorial Election. This qualitative study involved 500 students ($M_{age} = 19.01$) from thirteen electoral districts. Data were collected through a qualitative survey. The results showed that participants obtained information about the Central Java Gubernatorial Election from two main sources, namely people closest to them (parents and friends) and social media. Their political behavior is closely related to these two sources, including heeding news and campaigns on social media, and discussing candidates and issues surrounding the election with those closest to them. In our study, 87% of college students showed their intention to exercise their right to vote on November 27, 2024. The high intention was encouraged by the urge to fulfill rights as well as obligations as citizens; a positive attitude towards competent regional heads and the prosperity of Central Java; and the belief to be able to contribute. On the other hand, several participants showed their intention not to use their voting rights on the grounds that they do not reside in the electoral district, minimal information about the election, and incompatibility with the competing candidates. In a flawed democracy with a collective culture like Indonesia, this study confirms the central role of the social environment, both offline and online, in increasing college students' political engagement intentions.

Keywords: behavior; Central Java Gubernatorial Election; college student; political engagement; political psychology

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN, 2023). Setelah selesai menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan legislatif pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah serentak pada tanggal 27 November 2024. Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dilakukan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Salah satu provinsi dengan populasi besar yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah adalah Jawa Tengah. Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah mempertemukan pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Jendral TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E., M.A., M.Sc. dan Dr. H. Hendrar Prihadi alias Hendi, S.E., M.A. dengan paslon nomor urut 02 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

Pilgub Jawa Tengah menyita atensi publik setidaknya karena dua hal penting. Pertama, partai politik pengusung. Paslon nomor urut 01 diusung oleh partai yang mendominasi Jawa Tengah, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Pasca reformasi, jumlah kursi legislatif partai berlogo banteng moncong putih di tingkat provinsi selalu berada pada kisaran 23%-35%. Perolehan kursi legislatif tingkat provinsi pada pemilu tahun 2024 sebanyak 27,5%. Sementara paslon nomor urut 02 diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Perolehan kursi legislatif KIM Plus tingkat provinsi pada pemilu tahun 2024 sebanyak 72,5%.

Kedua, paslon yang berlaga. Calon gubernur 01 merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI tahun 2021-2022, sedangkan calon gubernur 02 merupakan purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah tahun 2020-2024. Kalangan akademisi, pengamat, dan masyarakat kerap menyebut Pilgub Jawa Tengah tahun 2024 sebagai “perang bintang” karena melibatkan purnawirawan bintang empat TNI dan bintang tiga POLRI. Calon wakil gubernur juga tidak kalah mentereng. Calon wakil gubernur 01 merupakan Walikota Semarang tahun 2013-2022 sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2022-2024, sementara calon wakil gubernur 02 merupakan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Keterlibatan politik seluruh lapisan masyarakat dalam pemilihan umum dibutuhkan oleh negara demokratis (Budiardjo, 2017), tidak terkecuali pada Pilgub Jawa Tengah. Salah satu elemen masyarakat yang diharapkan terlibat aktif dalam Pilgub Jawa Tengah adalah mahasiswa. Pada konteks sosial saat ini, mahasiswa merupakan generasi muda yang teredukasi sekaligus mempunyai kelihaihan dalam penggunaan teknologi informasi (Gentina, 2020). Mereka akrab dengan gawai sejak berusia remaja awal, bahkan kanak-kanak. Mahasiswa memiliki fasilitas yang cukup untuk mengakses informasi seputar Pilgub Jawa Tengah. Barangkali menjadi sebuah paradoks ketika sejumlah penelitian menilai bahwa generasi muda yang lihai dalam penggunaan teknologi informasi ini justru cenderung apatis terhadap politik (Eisewicht & Steinmann, 2022; Uberoi & Johnston, 2022; Zhang, 2022).

Pada situasi pemilihan umum, perilaku politik (*political behaviour*) yang paling sering dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya adalah perilaku seseorang dalam menggunakan hak pilih atau *voting behavior* (Cottam et al., 2016). Dalam kajian psikologi, perilaku seseorang didahului oleh niat atau intensi (*intention*) (Branscombe & Baron, 2017; Taylor et al., 2012). Salah satu kerangka teoretis yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang intensi seseorang dalam menggunakan hak pilih ialah *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB diperkenalkan oleh ilmuwan psikologi sosial, yaitu Ajzen (1985).

TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* (Fishbein & Ajzen, 1975). TRA berasumsi bahwa perilaku ialah hasil dari keputusan yang rasional. TRA menyatakan bahwa perilaku seseorang didahului oleh niat untuk mengaktualisasikan perilaku (*behavioral intention*) (Taylor et al. 2012). Ada dua faktor utama yang dapat memprediksi intensi perilaku, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude*) dan norma subjektif (*subjective norms*). Sikap terhadap perilaku bisa dilihat dari kemungkinan hasil perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku. Adapun norma subjektif bisa dilihat dari persetujuan oleh orang lain yang dianggap signifikan dan motivasi seseorang untuk menuruti keinginan orang lain tersebut.

Ajzen (1985) sadar bahwa TRA memiliki kelemahan, sehingga ia menambahkan satu faktor penting lain untuk memprediksi intensi perilaku, yaitu persepsi kontrol atas perilaku (*percieved behavioral control*). Seseorang bisa saja mempunyai sikap positif terhadap sesuatu hal dan didukung oleh norma subjektif, namun tanpa ada persepsi kontrol atas perilaku maka belum tentu ia akan melakukannya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa memiliki sikap positif terhadap penggunaan hak pilih dalam pemilu dan didukung oleh norma subjektif dari keluarganya, namun tanpa ada kemampuan untuk menuju tempat pemungutan suara –misal karena jaraknya jauh–, belum tentu ia akan menyalurkan hak pilih.

Meskipun inti dari hajatan Pilgub Jawa Tengah adalah penggunaan hak pilih, namun perlu dikaji pula perilaku politik lain yang turut menyertainya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perilaku politik yang menyertai penggunaan hak pilih dalam pemilu antara lain mengikuti berita dan isu politik melalui berbagai platform media, membagikan informasi melalui media sosial, mengikuti kampanye, mempersuasi orang lain untuk menggunakan hak pilih, menjadi relawan kampanye politik, serta mendonasikan uang untuk kampanye (Barrett & Pachi, 2019; Pontes et al., 2018; Powers et al., 2016; Schenider et al., 2023; Sokol & Merle, 2019). Hasil penelusuran literatur memperlihatkan bahwa terbatas penelitian empiris perilaku politik dan intensi penggunaan hak pilih yang secara spesifik memotret pengalaman mahasiswa pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, muncul dua pertanyaan: 1) Bagaimana perilaku politik mahasiswa dalam menghadapi Pilgub Jawa Tengah? serta 2) Bagaimana intensi penggunaan hak pilih pada mahasiswa dalam Pilgub Jawa Tengah? Penelitian bertujuan untuk memahami perilaku politik dan intensi penggunaan hak pilih pada mahasiswa dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2024. Penelitian menggali sumber informasi yang menjadi sandaran pengetahuan politik mahasiswa, ragam perilaku politik mahasiswa, intensi menggunakan hak pilih, dan alasan yang mendasari intensi penggunaan hak pilih pada mahasiswa dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2024.

METODE

Penelitian yang ditujukan untuk memahami perilaku politik dan intensi penggunaan hak pilih pada mahasiswa ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian melibatkan partisipan yang memenuhi kriteria inklusi yakni mahasiswa aktif yang berdomisili di Jawa Tengah dan berusia 18-27 tahun. Rentang usia tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada generasi Z yang sudah memiliki hak pilih. Berdasarkan kriteria inklusi, maka penelitian melibatkan 500 orang mahasiswa. Jumlah ini telah memenuhi jumlah minimal partisipan dalam survei kualitatif yang disarankan oleh Tran et. al. (2017).

Pengumpulan data menggunakan survei online. Survei online berisi beberapa pertanyaan, yaitu: 1) Apa saja sumber informasi Anda mengenai Pilgub Jawa Tengah? 2) Aktivitas apa saja yang

pernah Anda lakukan terkait Pilgub Jawa Tengah? 3) Apakah Anda akan menggunakan hak pilih pada Pilgub Jawa Tengah tanggal 27 November 2024? serta 4) Mengapa Anda menjawab demikian? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, seluruh partisipan mengisi pernyataan persetujuan (*informed consent*) terlebih dahulu. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2024 hingga 7 November 2024. Tanggal ini dipilih karena debat pertama Pilgub Jawa Tengah baru diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2024.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data. Jawaban atas pertanyaan tertutup dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, sementara jawaban atas pertanyaan terbuka dianalisis dengan menggunakan analisis tematik yang merujuk pada Braun dan Clarke (2007). Analisis tematik terdiri dari enam tahap yakni mengakrabi data, menghasilkan kode awal, menemukan tema, mengkaji tema, mendefinisikan dan memberi nama tema, serta membuat laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 500 mahasiswa yang berasal dari 13 Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (lihat Tabel 1). Jumlah pemilih di setiap Dapil memang tidak sama satu sama lain (lihat KPU Jateng, 2024). Peneliti telah mengupayakan agar presentase jumlah partisipan mahasiswa sedekat mungkin dengan proporsi jumlah pemilih di setiap Dapil. Rentang usia partisipan adalah 18 hingga 27 tahun ($M_{usia} = 19.01$ tahun).

Tabel 1.
Jumlah Partisipan

Dapil	Jumlah Partisipan	
	N	Presentase
Dapil I	33	6,60%
Dapil II	32	6,40%
Dapil III	43	8,60%
Dapil IV	27	5,40%
Dapil V	33	6,60%
Dapil VI	40	8,00%
Dapil VII	44	8,80%
Dapil VIII	40	8,00%
Dapil IX	38	7,60%
Dapil X	43	8,60%
Dapil XI	59	11,80%
Dapil XII	36	7,20%
Dapil XIII	32	6,40%
Total	500	100,00%

Media Sosial dan Orang Terdekat sebagai Sumber Informasi Utama Mahasiswa

Penelitian ini menemukan bahwa media sosial (*social media*) dan orang terdekat (*significant others*) merupakan sumber informasi utama bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi seputar Pilgub Jawa Tengah (lihat Grafik 1). Media sosial yang paling banyak digunakan mahasiswa secara berurutan adalah Instagram, TikTok, dan Twitter atau X. Popularitas Instagram dan TikTok di kalangan mahasiswa selaras dengan tren penggunaan kedua media sosial tersebut di generasi Z secara umum. Instagram dan TikTok menempati posisi pertama dan ketiga media sosial yang paling diminati generasi Z (APJII, 2024). Sementara itu, meskipun

Facebook merupakan media sosial kedua yang paling diminati oleh generasi Z (APJII, 2024), platform ini kurang populer di kalangan mahasiswa. Hanya 7,58% mahasiswa yang menjadikan Facebook sebagai sumber informasi seputar Pilgub Jawa Tengah.

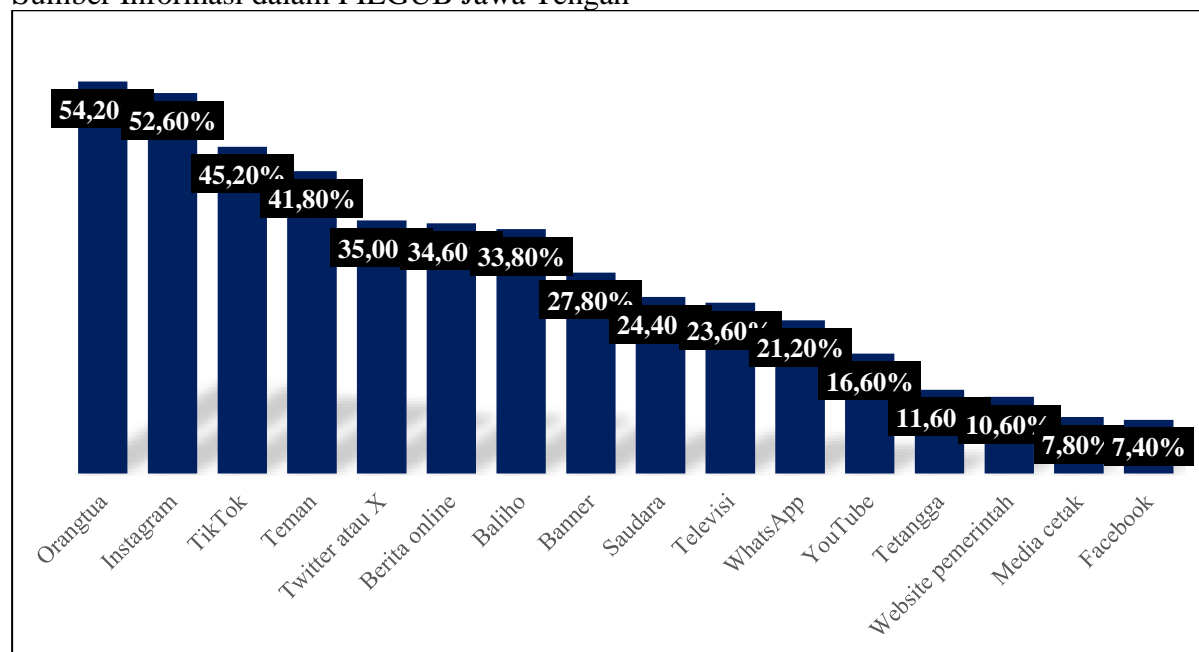
Orang terdekat, seperti orangtua dan teman, juga berperan sebagai sumber informasi dalam Pilgub Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Alfaruqy et al. (2022a) menunjukkan bahwa keluarga, khususnya orangtua, berperan penting dalam sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses di mana individu mengembangkan orientasi, nilai, dan perilaku politik yang cenderung akan bertahan sepanjang rentang kehidupannya. Keluarga dan teman menjadi agen utama sosialisasi politik, selain media serta sekolah (Neundorf & Smets, 2017).

Meskipun tidak sekuat media sosial dan orang terdekat, alat peraga kampanye berupa baliho serta banner yang betebaran di ruang publik juga dapat menjadi sumber informasi dalam Pilgub Jawa Tengah. Namun, fakta ini perlu menjadi perhatian serius oleh paslon dan tim suksesnya: apakah pemasangan baliho benar-benar efektif atau justru merusak pemandangan (Andu & Hardiyanti, 2019) dan melanggar hukum (Putri & Triadi, 2024). Dalam kajian psikologi, persepsi negatif terhadap sesuatu hal yang terasosiasi dengan kandidat dapat berpotensi menurunkan citra positif sang kandidat (Cottam et al., 2016).

Hanya sebagian kecil partisipan mahasiswa yang memanfaatkan media tradisional, seperti televisi dan media cetak, sebagai sumber informasi. Media tradisional memang masih menjadi sumber informasi bagi banyak orang (Ahmad & Zain, 2021). Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, media digital terutama media sosial telah menunjukkan eksistensi yang semakin jelas (Kholid et al., 2023). Tantangan yang perlu menjadi atensi dalam penggunaan media sosial oleh mahasiswa tentu terkait dengan berita bohong (*hoax*). Pasalnya, saat masa pemilu, pemilih muda biasanya akan dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan verifikasi informasi (Nurrahmi & Syam, 2020), serta membedakan antara berita bohong dan berita asli (Aminah & Sari, 2019).

Grafik 1.

Sumber Informasi dalam PILGUB Jawa Tengah



Menyimak dan Berdiskusi sebagai Aktivitas Paling Dominan

Pada temuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa media sosial dan orang terdekat menjadi sumber informasi utama bagi mahasiswa. Hal ini selaras dengan temuan yang menunjukkan bahwa aktivitas politik mahasiswa cenderung pada aktivitas menyimak dan berdiskusi (Tabel 1). Lebih dari separuh mahasiswa, tepatnya 61,80%, menyimak berita tentang Pilgub Jawa Tengah. Menyimak berita tentang Pilgub termasuk dalam keterlibatan politik tipe kognitif, di mana seseorang secara kognitif memahami kondisi politik (Alfaruqy et al., 2022b). Pada umumnya, mahasiswa akan menyimak dan mempercayai berita dengan pertimbangan kelogisan informasi, kredibilitas komunikator, serta sentuhan emosional (Biba et al., 2023).

Tabel 1.
Aktivitas Mahasiswa Menyambut PILGUB Jawa Tengah

No	Aktivitas	N	Presentase
1	Menyimak berita tentang Pilgub Jawa Tengah	309	61.80%
2	Menyimak kampanye/debat Cagub/Cawagub	127	25.40%
3	Mendiskusikan Pilgub Jawa Tengah dengan teman	110	22.00%
4	Mendiskusikan Pilgub Jawa Tengah dengan orangtua	101	20.20%
5	Mendiskusikan Pilgub Jawa Tengah dalam perkuliahan	54	10.80%
6	Mendiskusikan Pilgub Jawa Tengah dengan saudara	42	8.40%
7	Mengomentari Pilgub Jawa Tengah di media sosial	24	4.80%
8	Mempersuasi orang lain untuk menggunakan hak pilih sesuai pilihannya	19	3.80%
9	Mengikuti media sosial Cagub/Cawagub yang saya dukung	18	3.60%
10	Mengikuti media sosial Cagub/Cawagub yang tidak saya dukung	9	1.80%
11	Mempersuasi orang lain untuk menggunakan hak pilih yang selaras dengan pilihan saya	6	1.20%
12	Me-repost unggahan tentang Cagub/Cawagub yang dukung	5	1.00%
13	Menulis artikel tentang tentang Pilgub Jawa Tengah	4	0.80%
14	Me-repost unggahan tentang Pilgub Jawa Tengah secara umum	3	0.60%
15	Membuat konten tentang Cagub/Cawagub yang saya dukung	2	0.40%
16	Membuat konten tentang Pilgub Jawa Tengah secara umum	2	0.40%
17	Menjadi relawan relawan Cagub/Cawagub yang Anda dukung	2	0.40%
18	Tidak ada satupun	108	21.60%

Mahasiswa mendiskusikan Pilgub Jawa Tengah dengan teman. Berdiskusi merupakan salah satu cara seseorang untuk menganalisis kondisi politik (Alfaruqy et al., 2022b). Penelitian yang dilakukan Klofstad (2015) menunjukkan bahwa diskusi politik yang bersifat intim bersama teman mempunyai efek keterlibatan yang konsisten dari waktu ke waktu. Melalui diskusi dengan teman, seseorang dapat memperoleh informasi tentang isu-isu sosial politik, berbagi budaya populer, dan mengembangkan nilai baik yang sama maupun berbeda (Neundorf & Smets, 2017).

Selain dengan teman, mahasiswa juga melakukan diskusi dengan keluarga. Diskusi merupakan metode sosialisasi politik dalam mikrosistem keluarga, selain tanya-jawab dan saling berpendapat (Alfaruqy et al., 2022a). Diskusi dengan keluarga adalah bentuk *direct transmission*, di mana orangtua menginternalisasikan nilai dan preferensi politik secara lugas kepada anaknya (Ojeda & Hatemi, 2015). Melalui percakapan yang ringan dalam aktivitas sehari-hari, orangtua biasanya akan mengungkapkan pandangan, perasaan, dan pilihan politik kepada anaknya.

Meskipun demikian, kurang dari 5,00% mahasiswa yang menunjukkan pandangan politiknya di ruang publik dunia maya. Hanya 4,80% mahasiswa yang mau menulis komentar dan hanya 1,00% mahasiswa yang mau *re-post* unggahan tentang Cagub/Cawagub di media sosial. Mahasiswa Indonesia, khususnya Jawa Tengah, cukup berhati-hati dalam mengekspresikan pandangan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh norma sosial masyarakat yang menempatkan politik sebagai urusan privat. Penjelasan yang lain, mahasiswa menghindari serangan dari pendengung (*buzzer*) yang kian marak di media sosial (Sugiono, 2020). Di negara dengan demokrasi yang lebih mapan, misalnya Amerika Serikat, aktivitas menunjukkan pandangan politik di media sosial pun hanya dilakukan oleh 18,00% mahasiswa (Carlisle & Paton, 2013).

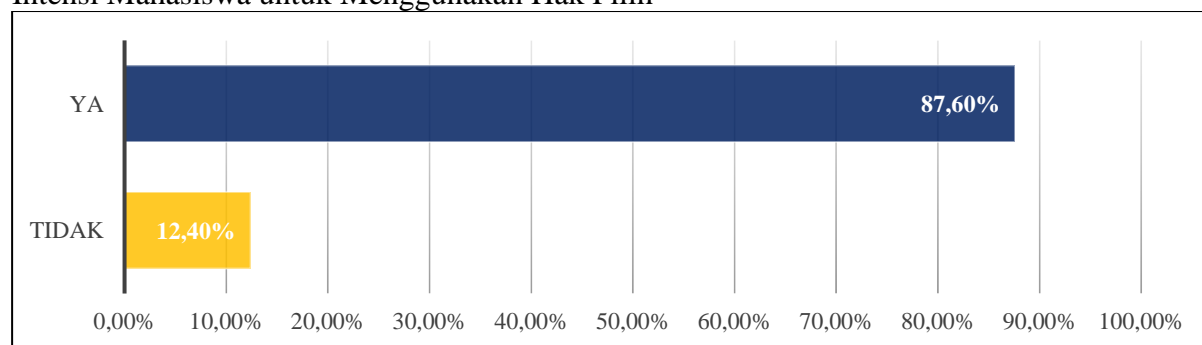
Setidaknya 108 dari 500 (atau 21,60%) mahasiswa mengaku tidak melakukan aktivitas apapun terkait dengan Pilgub Jawa Tengah. Hal tersebut perlu mendapat perhatian bersama dalam alam demokrasi Indonesia. Intensi yang tinggi untuk menggunakan hak pilih (lihat Grafik 2), kurang diimbangi dengan atensi politik yang menyertai. Atensi politik, yaitu sejauh mana seseorang memiliki perhatian pada sumber informasi politik di media massa atau diskusi politik, menjadi atenseden bagi partisipasi politik (Barrett & Pachi, 2019).

Intensi Tinggi Mahasiswa untuk Menggunakan Hak Pilih

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Jawa Tengah, yaitu 87,60%, memiliki intensi untuk menggunakan hak pilih dalam Pilgub (lihat Grafik 2). Pada penelitian lain yang sedang peneliti kerjakan, intensi mahasiswa untuk menggunakan hak pilih dalam Pilpres 2024 yang lalu lebih dari 97,00%. Relatif sama dengan penelitian ini, pengumpulan data penelitian tersebut juga dilakukan kurang dari satu bulan sebelum pemungutan suara. Artinya, intensi penggunaan hak pilih pada Pilgub lebih rendah daripada Pilpres.

Grafik 2.

Intensi Mahasiswa untuk Menggunakan Hak Pilih



Lalu, bagaimana dengan penggunaan hak pilih secara aktual? Penelitian ini menemukan bahwa 95,00% mahasiswa Jawa Tengah menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024. Angka tersebut memang sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan intensi untuk menggunakan hak pilih dalam Pilpres secara nasional (yang lebih dari 97,00%). Meskipun demikian, angka ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka partisipasi nasional, yang “hanya” 81,78% menurut data KPU.

Temuan tersebut bisa menjadi bukti bahwa mahasiswa, setidaknya di Indonesia, tidak seapatis yang dikhawatirkan banyak pihak (Eisewicht & Steinmann, 2022; Uberoi & Johnston, 2022; Zhang, 2022). Mahasiswa menunjukkan keterlibatan politik yang tinggi dalam kegiatan politik konvensional seperti pemilihan umum. Barangkali yang perlu menjadi atensi ilmuwan psikologi politik adalah sejauh mana mahasiswa paham dengan dinamika politik dan pilihan

politiknya. Selain itu, perlu ditelisik lebih lanjut tentang varian keterlibatan politik mahasiswa yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.

Alasan yang Mendasari Intensi Menggunakan Hak Pilih

Seperti yang telah diulas, sebanyak 87,60% atau 438 mahasiswa memiliki intensi untuk menggunakan hak pilih. Penelitian ini menemukan lima alasan yang menjelaskan intensi mahasiswa tersebut, yaitu mempersepsi voting sebagai kewajiban dan keharusan, mempersepsi voting sebagai hak, memiliki sikap positif terhadap kepemimpinan baru, memiliki sikap positif terhadap kemajuan Jawa Tengah, serta menyakini mampu untuk berkontribusi.

Pertama, Mempersepsi Voting sebagai Kewajiban dan Keharusan

Mahasiswa akan menggunakan hak pilih karena mempersepsi bahwa memilih (*voting*) adalah kewajiban yang harus ditunaikan, baik secara hukum, moral, maupun sosial. Kategori ini didukung oleh 90 jawaban mahasiswa. Sebagaimana disampaikan oleh Partisipan 090 yang berinisial ALV, dirinya menyadari bahwa sebagai warga Jawa Tengah yang telah memenuhi syarat maka wajib baginya untuk menggunakan hak pilih.

"Karena saya merupakan warga atau penduduk Jawa Tengah dan itu menjadi kewajiban saya." (Partisipan 090_ALV)

Penelitian Syibulhuda et al. (2019) juga menunjukkan bahwa mahasiswa memilih dalam pemilu karena menunaikan kewajiban. Dalam tinjauan hukum di Indonesia, sebetulnya memilih dalam pemilihan umum bukanlah kewajiban. Ketentuan ini tentu berbeda dengan Australia yang mewajibkan warga negaranya untuk memilih dalam pemilu (Bonotti & Stangio, 2021). Meskipun merupakan sebuah kesalahan persepsi, di sisi lain hal tersebut menguntungkan bagi angka partisipasi pemilu di Indonesia.

Kedua, Mempersepsi Voting sebagai Hak

Mahasiswa akan menggunakan hak pilih karena mempersepsi bahwa memilih adalah hak setiap warga negara, tanpa adanya tekanan. Kategori ini didukung oleh 110 jawaban mahasiswa. Sebagaimana jawaban Partisipan 237 yang berinisial I, memilih dalam Pilgub Jawa Tengah merupakan haknya sebagai warga negara.

"Karena sudah menjadi hak sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya." (Partisipan 237_I)

Dalam tinjauan hukum, memilih dalam pemilihan umum merupakan hak warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah (Cerdas & Afandi, 2019). Agaknya kesalahan persepsi tentang memilih sebagai kewajiban perlu digeser menuju pemahaman tentang tanggung jawab (*responsibility*). Sehingga dapat menjadi norma bersama bahwa memilih merupakan hak warga negara, namun sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) maka hak tersebut perlu dipergunakan secara bertanggung jawab. *Systematic literature review* yang dilakukan Villalobos et al. (2021) menemukan bahwa warga negara yang baik identik dengan keselarasan dengan norma dan perilaku aktif untuk negaranya.

Ketiga, Memiliki Sikap Positif terhadap Kepemimpinan Baru

Mahasiswa akan menggunakan hak pilih karena sikap positif terhadap kepemimpinan baru yang adil dan kompeten untuk menyelesaikan permasalahan di Jawa Tengah. Kategori ini didukung oleh 54 jawaban mahasiswa. Sebagaimana disampaikan oleh Partisipan 125 yang berinisial SW, dirinya memilih karena menginginkan pemimpin baru yang kompeten. Kompetensi merupakan kunci guna memastikan keberhasilan kepala daerah dalam memimpin dan membawa perubahan positif bagi daerahnya.

"Biar mendapatkan pemimpin yang kompeten." (Partisipan 125_SW)

Syibulhuda et al (2019) juga menemukan bahwa mahasiswa memilih dalam pemilu karena termotivasi untuk mendukung kandidat tertentu yang dirasa tepat menjadi pemimpin. Selaras dengan *Theory of Planned Behavior*, sikap positif seseorang terhadap sesuatu hal dapat memprediksi intensi perilakunya (Branscombe & Baron, 2017; Taylor et al., 2012). Sikap positif terhadap paslon yang adil dan kompeten mendorong mahasiswa untuk menggunakan hak pilih.

Keempat, Memiliki Sikap Positif terhadap Kemajuan Jawa Tengah

Mahasiswa akan menggunakan hak pilih karena mempunyai sikap positif terhadap kemajuan Jawa Tengah yang lebih makmur dan sejahtera. Kategori ini didukung oleh 41 jawaban mahasiswa. Sebagaimana disampaikan oleh Partisipan 467 yang berinisial NHS, dirinya memilih demi Jawa Tengah yang lebih maju.

"Karena sebagai warga Jateng, saya akan memilih untuk kelangsungan hidup Jateng yang lebih maju" (Partisipan 467_NHS)

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda cenderung menyukai hal-hal yang relevan dalam kehidupannya (Gentina, 2020). Oleh sebab itu, program untuk kemajuan Jawa Tengah perlu diimbangi dengan isu-isu yang sentral di kalangan mahasiswa, misalnya peningkatan kualitas pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Jangan sampai ada kesenjangan antara isu-isu yang disoroti oleh generasi muda dengan elite politik (Deihl & Chan, 2021).

Kelima, Kemampuan untuk Berkontribusi

Mahasiswa akan menggunakan hak pilih karena secara personal ingin berkontribusi terhadap masa depan Jawa Tengah, yang merupakan provinsi tempat tinggalnya. Kategori ini tercermin dari 75 respon jawaban. Sebagaimana disampaikan oleh Partisipan 180 berinisial KC, bahwa secara personal penting baginya terlibat dalam proses demokrasi lima tahunan ini untuk memastikan bahwa ada perubahan nyata di tingkat daerah.

"Ya, saya akan menggunakan hak pilih pada Pilgub Jateng tanggal 27 November 2024 mendatang. Bagi saya, memilih dalam Pilgub adalah kesempatan untuk berkontribusi pada perubahan nyata di tingkat daerah. Saya merasa bahwa suara saya berpotensi untuk mendukung pemimpin yang memiliki visi yang kuat, berintegritas, dan berkomitmen pada isu-isu utama yang relevan untuk masyarakat Jawa Tengah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja." (Partisipan 180_KC)

Penelitian Alfaruqy dan Padmonurcahyo (2023), yang dilakukan di luar konteks pemilu, menemukan bahwa dorongan berkontribusi merupakan faktor dominan untuk menjelaskan keterlibatan politik pada mahasiswa. Selain dorongan berkontribusi, terdapat faktor lain seperti persepsi terhadap negara, akses informasi, dan lingkungan sosial yang menjelaskan keterlibatan mahasiswa dalam politik. Menurut Cottam et al. (2016), dorongan berkontribusi ini erat kaitannya dengan nasionalisme seseorang. Seseorang melakukan hal-hal yang berkontribusi positif untuk meningkatkan nilai *in-group*-nya.

Alasan yang Mendasari Intensi Tidak Menggunakan Hak Pilih

12,40% atau 62 mahasiswa memiliki intensi untuk tidak menggunakan hak pilih pada Pilgub Jawa Tengah. Penelitian ini menemukan tiga tema yang menjelaskan intensi mahasiswa tersebut, yakni jauhnya lokasi pemilihan, minimnya informasi, dan ketidakcocokan dengan paslon yang berkompetisi.

Pertama, Jauhnya Lokasi Pemilihan

Mahasiswa tidak akan menggunakan hak pilih karena lokasi tempat pemungutan suara yang jauh. Pada saat hari-H Pilgub, tidak semua mahasiswa berada di kota/kabupaten asal karena merantau ke kota/kabupaten lain atau bahkan ke provinsi lain untuk urusan pendidikan. Kategori ini tercermin dari 34 respon jawaban. Seperti dikemukakan oleh Partisipan 258 yang berinisial N, dirinya sedang merantau untuk urusan pendidikan dan kemungkinan besar tidak akan pulang ke kota/kabupaten asal.

"Karena saya merantau dan kemungkinan besar saya tidak pulang sehingga saya tidak bisa menggunakan hak pilih saya" (Partisipan 258_N)

Rata-rata perguruan tinggi, kemungkinan, masih menyelenggarakan perkuliahan di hari-hari sekitar tanggal 27 November 2024. Meskipun terdapat mekanisme pindah lokasi pemilihan, tidak semua mahasiswa tergerak untuk mengurusnya. Apabila lintas provinsi, hal tersebut jelas tidak mungkin bisa untuk dilakukan (berbeda halnya dengan Pilpres). Dari perspektif *Theory of Planned Behaviour*, jelas bahwa alasan utama mahasiswa tidak akan menggunakan hak pilih berkaitan dengan *perceived behavioral control*.

Kedua, Minimnya Informasi

Mahasiswa masih merasa kurang informasi tentang Pilgub Jawa Tengah. Kurangnya informasi membuat mereka tidak cukup wawasan dalam membuat keputusan pilihan. Kategori ini tercermin dari 6 respon jawaban. Seperti dikemukakan oleh Partisipan 055 yang berinisial JIL, kurangnya informasi tentang Pilgub Jawa Tengah menyebabkan dirinya tidak tertarik atau bahkan tidak yakin apakah akan menggunakan hak pilih.

"Belum tau informasi apapun soal Pilgub Jateng 2024" (Partisipan 055_JIL)

Informasi yang cukup dibutuhkan dalam mengkonsolidasikan skema pengetahuan (Cottam et al., 2016). Pengetahuan yang solid pada gilirannya dapat menjadi pemandu seseorang dalam mengambil keputusan. Seseorang yang minim pengetahuan tentang paslon dan minim pengetahuan tentang urgensi penggunaan hak pilih cenderung tidak akan menggunakan hak pilihnya. Salah satu penjelasan mengapa seseorang *engaged* atau *disengaged* dengan politik ialah terkait kepentingan personalnya (*personal interest*) (Alfaruqy & Padmonurcahyo, 2023). Kepentingan personal akan menggerakkan seseorang untuk secara aktif mencari informasi. Tanpa kepentingan tersebut, seseorang akan cenderung pasif dalam mencari informasi.

Ketiga, Ketidakcocokan dengan Paslon

Mahasiswa merasa bahwa paslon yang tersedia tidak cocok dengan preferensi politiknya. Kategori ini tercermin dari 4 respon jawaban. Seperti dikemukakan oleh Partisipan 021 yang berinisial GLR, tidak ada pilihan yang sesuai dengan nilai atau preferensinya.

"Tidak ada yang cocok" (Partisipan 021_GLR)

Dalam kondisi tertentu, seseorang tidak akan memilih bukan karena minimnya informasi, tetapi karena menyadari bahwa paslon yang berkompetisi tidak memenuhi kriteria yang diharapkan. Sikap negatif terhadap sesuatu hal dapat menurunkan intensi perilaku yang terkait dengan hal tersebut (Taylor et al., 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka intensi mahasiswa untuk menggunakan maupun tidak menggunakan hak pilih dapat dijelaskan dalam kerangka *Theory of Planned Behaviour* (Ajzen, 1985). Mahasiswa yang memiliki intensi untuk menggunakan hak pilih cenderung mempunyai sikap positif terhadap kepemimpinan baru yang adil dan kompeten serta terhadap kemajuan

Provinsi Jawa Tengah di masa yang akan datang (*attitude*). Hal ini diperkuat oleh norma sosial yang membentuk pemahaman mereka bahwa memilih dalam pemilu merupakan hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara (*subjective norms*). Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat kebutuhan akan pergeseran dari persepsi mahasiswa, dari melihat pemilu sebagai kewajiban menjadi pemahaman yang mendalam tentang pemilu sebagai tanggung jawab. Selain itu, mahasiswa yang memiliki intensi menggunakan hak pilih juga yakin bahwa mereka bisa berkontribusi pada Pilgub tanggal 27 November 2024 (*perceived behavioral control*). Di sisi lain, hambatan terkait *perceived behavioral control* seperti jauhnya jarak lokasi pemilihan bisa mengurangi intensi mahasiswa untuk berpartisipasi. Sikap negatif terhadap paslon juga dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak menggunakan hak pilih (*attitude*).

Oleh sebab itu, perlu dukungan semua pihak untuk menyukseskan pemilu, termasuk Pilgub. Pertama, membangun sikap positif mahasiswa terhadap pemilu, dengan menekankan bahwa pemimpin yang terpilih kelak akan mempengaruhi kemajuan suatu daerah dan berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Kedua, membangun norma sosial yang menjadikan pemilu sebagai kesempatan untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Ketiga, memberi akses informasi, ruang, dan waktu agar mahasiswa dapat merasa memiliki kontrol lebih besar untuk menyalurkan hak pilihnya.

KESIMPULAN

Mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang diharapkan terlibat dalam pemilihan umum kepala daerah, termasuk Pilgub Jawa Tengah. Mahasiswa memperoleh informasi seputar Pilgub Jawa Tengah melalui dua sumber utama, yaitu orang terdekat khususnya orangtua dan teman, serta media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Perilaku politik mahasiswa bersentuhan erat dengan kedua sumber tersebut, antara lain menyimak berita tentang Pilgub Jawa Tengah, menyimak kampanye/debat Cagub/Cawagub, serta mendiskusikan paslon dan isu-isu seputar Pilgub dengan orang terdekat.

Sebagian besar mahasiswa menunjukkan intensi untuk menggunakan hak pilih pada Pilgub Jawa Tengah tanggal 27 November 2024. Hal yang mempengaruhi intensi dalam menggunakan hak pilih meliputi dorongan memenuhi hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara; sikap positif terhadap kepala daerah yang kompeten dan kemakmuran Jawa Tengah; serta keyakinan untuk dapat berpartisipasi untuk masa depan Jawa Tengah. Di sisi lain, sejumlah mahasiswa menunjukkan intensi tidak menggunakan hak pilih dengan alasan lokasi tempat pemilihan yang jauh, informasi tentang Pilgub yang minim, serta ketidakcocokan dengan paslon.

Dalam konteks negara *flawed democracy* dengan budaya kolektif seperti Indonesia, penelitian ini menegaskan peran sentral lingkungan sosial, baik secara luring maupun daring, dalam meningkatkan intensi keterlibatan politik mahasiswa. Penelitian ini melibatkan mahasiswa dengan beragam latar belakang organisasi, pendidikan, dan status sosial-ekonomi, dengan konteks pemilihan umum di tingkat daerah. Penelitian selanjutnya dapat fokus dalam memahami keterlibatan politik mahasiswa dengan latar belakang tertentu dan di luar konteks pemilihan umum.

REFERENSI

Ahmad, Z. & Zain, Z. M. (2021). Political involvement among youth in Malaysia: Lessons learn. *International Journal of Media and Communication Research*, 2(1), 11-22. <https://doi.org/10.25299/ijmcr.v2i1.6122>

- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckman (eds.), *Action-control: From cognition to behavior* (hal. 11-39). Springer.
- Alfaruqy, M. Z., Emeraldita, T. V. & Dewi, A. C. (2022a). Keluarga sebagai mikrosistem sosialisasi politik: Survei psikologi politik. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi)*, 13(1), 73–87. <https://doi.org/10.24036/rapun.v13i1.114885>
- Alfaruqy, M. Z., Padmonurcahyo, A., & Salsabila, A. Z. (2022b). Explaining the forms of generation Z's political engagement: A study on generation Z in Semarang, Indonesia. *Simulacra*, 5(2), 99– 112. <https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.17047>.
- Alfaruqy, M. Z. & Padmonurcahyo, A. (2023). What drives political engagement of the young generation? A political psychology study. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(1), 36-47. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i1.335>
- Aminah & Sari, N. (2019). Dampak hoax di media sosial facebook terhadap pemilih pemula. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1), 51-61. <https://doi.org/10.24815/jkg.v8i1.13565>
- Andu, C. P. & Hardiyanti, S.K. (2019). Pengaruh baliho terhadap pilihan politik masyarakat kelas menengah pada pilkada di Kota Makassar. *Jurnal Representamen*, 5(2), 59-70. <https://doi.org/10.30996/representamen.v5i02.2941>
- APJII. (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- ASEAN. (2023). *ASEAN statistical yearbook 2023*. ASEAN Secretariat
- Barrett, M. & Pachi, D. (2019). *Youth civic and political engagement*. Routledge.
- Biba, A. T. L., Zefanya, D. S., Rifaldy, D., & Alfaruqy, M. Z. (2023). Persepsi generasi Z terhadap komunikasi publik di masa pandemi covid-19. *Jurnal Empati*, 12(4), 275-281. <https://doi.org/10.14710/empati.2023.38739>
- Bonotti, M. & Strangio, P. (2021). *A century of compulsory voting in Australia*. Palgrave Macmillan.
- Braun, V. & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Media Utama.
- Carlisle, J. E., & Patton, R. C. (2013). Is social media changing how we understand political engagement? An analysis of facebook and the 2008 presidential election. *Political Research Quarterly*, 66(4), 883–895. <https://doi.org/10.1177/1065912913482758>
- Cottam, M.L., Masters, E., Preston, T., & Dietz_Uhler, B. (2016). *Introduction to political psychology* (3rd ed.). Routledge
- Diehl, J.A. & Chan, I. S. L. (2021), Is it just apathy? Using the Theory of Planned Behaviour to understand young adults' (18 to 35 years old) response to government efforts to increase planning participation in Singapore. *Urban Governance*, 1(2), 89-97. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2021.12.005>
- Dekker, H. (2014). Voting and not voting: The principal explanations. In P. Nesbit-Larking, C. Kinnval, T. Capelos, & H. Dekker. (2014). *The palgrave handbook of global political psychology* (pp204-219). Palgrave.
- Eisewicht, P., & Steinmann, N.M. (2022). Youth on the move? On the transformation of political engagement in the second modernity. In R. Spannring, W. Smidt, & C. Unterrainer (eds), *Institutions and Organizations as Learning Environments for Participation and Democracy*. Springer.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley.
- Gentina, E. (2020). Generation z in Asia: A research agenda. In E. Gentina & E. Parry (Eds.), *What the experts tell us about South East Asia: Dynamics, differences, digitalization* (pp. 3–19). <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-220-820201002>

- Kholid, A., Husein, R., Mutiarin, D., & Listiya, S. E. R. (2023). The influence of social media towards student political participation during the 2014 Indonesian Presidential Election. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 6(2), 246–264. <https://doi.org/10.18196/jgp.2015.0019>
- KPU Jateng. (2024). *Rekapitulasi DPT Pilgub Jateng 2024*. KPU Jateng. <https://www.instagram.com/kpujateng/p/DASeIDaP14w/>
- Neundorf, A. & Smets, K. (2016). Political socialization and the making of citizens. In *Oxford Handbook Topics in Politics*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935307.013.98>
- Nurrahmi, F. & Syam, H. M. (2020). Perilaku informasi mahasiswa dan hoaks di media sosial. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 129-146. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.9215>
- Ojeda, C., & Hatemi, P. K. (2015). Accounting for the child in the transmission of party identification. *American Sociological Review*, 80(6), 1150-1174. <https://doi.org/10.1177/0003122415606101>
- Pontes, A., Henn, M. & Griffiths, M.D. (2018). Towards a conceptualization of young people's political engagement: a qualitative focus group study. *Societies*, 8(17), 1-17. <https://doi.org/10.3390/soc8010017>
- Powers, E., Moeller, S., & Yuan, Y. (2016). Political engagement during a presidential election year: A case study of media literacy students. *Journal of Media Literacy Education*, 1-13.
- Putri, S. L. A. & Triadi, I. (2024). Pelanggaran hukum terhadap pemasangan baliho partai dalam masa kampanye pemilihan umum calon legislatif di DKI Jakarta: (Legal violations against the installation of party billboards during the general election campaign period legislative candidates in Jakarta). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2370>
- Schneider, F. M., Knop-Huelss, K., Kim, J., Buhin, L., Gröning, M., Umel, A., & Odağ, O. (2023). What role does media entertainment play in emerging adults' political identity and engagement. *International Journal of Communication*, 17(2023), 1445–1465.
- Sokol, B.W. & Marle, P.D. (2019). Civic and faith life in college: A twopart investigation of university students' political and spiritual engagement. *Journal of Student Affairs Research and Practice*, 56:5, 550-563. <https://doi.org/10.1080/19496591.2019.1669454>
- Sugiono, S. (2020). Fenomena industri buzzer di Indonesia: Sebuah kajian ekonomi politik media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 47-66. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>
- Syibulhuda, F. M., Prabasari, E. D., Cahyadi, D. S., Arsari, N. M. C. D., & Alfaruqy, M. Z. (2019). Pemimpin di mata mahasiswa: Membaca partisipasi mahasiswa dalam kompetisi pemilihan umum presiden tahun 2019. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Ikatan Psikologi Sosial IX & Musyawarah Nasional IPS tahun 2019* (pp. 286–307). Universitas Sebelas Maret.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D.O. (2012). *Psikologi sosial* (12th ed.). Kencana.
- Tran, V.-T., Porcher, R., Tran, V.-C., & Ravaud, P. (2017). Predicting data saturation in qualitative surveys with mathematical models from ecological research. *Journal of Clinical Epidemiology*, 82, 71-78. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.10.001>
- Uberoi, E. & Johnston, N. (2022). *Political disengagement in the UK: Who is disengaged?* House of Commons.
- Villalobos, C., Morel, M.J., Treviño, E. (2021). What is a “good citizen”? A systematic literature review. In Treviño, E., Carrasco, D., Claes, E., Kennedy, K.J. (eds), *Good Citizenship for the Next Generation*. Springer.
- Zhang, W. (2022). Political disengagement among youth: A comparison between 2011 and 2020. *Frontiers in Psychology*, 13, 809432.